PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH
(Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat)

INFLUENCE OF LOCAL TAX AND REGIONAL RETRIBUTIONTO REGIONAL EXPENDITURE
(*Survey On The Local Government District/City In West Java*)

Oleh :
Fitria Afrianty
21110194

Program Studi Akuntasi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

West Java Province which has the potential of large areas including human resources, thus the greater the demands for increased PAD as more and more authority is delegated to local government. Results of local tax revenue and levies is a very large sector to be dug and expanded its management. The result of tax revenues and retributions have not been adequately recognized and has a relatively small role on the budget, especially for the county or city. All this is caused by the administration and management of local taxes and retributions that are not orderly, so the potential is not collectible.

This study aims to determine the effect of local taxes and levies to the shopping area in West Java province in 2010-2012. In local government financing task of governance and development always requires a reliable source of revenue (Siahaan, 2013:1).

The method used is descriptive analysis and verification consists of independent variables local taxes and levies, as well as the dependent variable expenditure. The sampling technique using Yamane formula or Slovin with number of 27 districts in West Java. Retrieval of data using secondary data. Methods of statistical analysis were used with the description and analysis of multiple linear regression.

Based on the survey results revealed a correlation value of local taxes and levies to shopping at 0.653. This means that there is a strong relationship. Expenditure variable regions can be explained by the variable local taxes and levies of 42.6% while the remaining 57.4% is explained by other factors not examined. There is a significant effect and either simultaneously or partially the effect of Local Taxes and Levies of the Shopping Area*.*

Keywords: Local Tax, Regional Retribution, Regional Expenditure

---

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diyakini akan mampu mendekatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memupuk demokrasi lokal (Chalid, 2005:5). Dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, maka tantangan utama pembangunan yang harus dihadapi dan diatasi yaitu : (a) penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan; (b) pembangunan tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah; dan (c) peningkatan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah (Permedagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD).

Kadjatmiko dalam (Halim, 2007:194) mengatakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada arah desentralisasi daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (tax assigment). Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) terjadi hubungan keagenan (Halim & Abdullah : 2006).

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengungkapkan banyak daerah yang menghabiskan anggaran belanja hingga 80% untuk belanja pegawai, hal ini dapat mengurangi kemampuan APBD untuk melaksanakan program kesejahteraan rakyat (wartaekonomi.co.id 22 Juli 2013). Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (Dinata, 2008).

Wakil Presiden Boediono melihat dalam pelaksanaan otonomi masih ada masalah yang sama, utamanya terkait dengan belanja pegawai dan belanja rutin yang sangat besar, akibatnya ruang untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik menjadi kecil (Republika.co.id 12-02-2013). Berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut Darise (2008:138-141) fungsi-fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Dwi&Elva, 2012). Sedangkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada PP Pasal 4 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan (Ebit et.al, 2012).

Lex Laksamana yang membacakan pidato Gubernur Jawa Barat menyebutkan potensi daerah Jabar sangat besar termasuk sumber daya manusianya, bahkan 65% industri infrastruktur nasional ada di Jabar,"tetapi potensi perolehan pajak industri manufaktur masih belum optimal selama ini mayoritas kantor pusat industri manufaktur ada di jakarta, akibatnya pajak pun masuk ke pusat" (Bandung Mi.com 12/06/12). Menurut Suparmoko (2002:55) pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar, kemudian diikuti dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah (Dwi dan Elva, 2012). Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa atas pungutan dasar persetujuan pemerintah pusat (Lilis dan Yohana 2012).

Slamet Kurniawan (Kepala Perwakilan BPK RI Prov. Jabar) mengungkapkan atas pemeriksaan yang dilakukan BPK RI atas APBD Jawa Barat maka beliau berpendapat sebagai berikut, pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai "seperti penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah tidak tertib, penggunaan langsung atas pendapatan daerah, serta tunggakan pajak yang berpotensi tidak tertagih, pengelolaan belanja daerah yang belum sesuai ketentuan perundang-undangan". BPK RI pun menemukan realisasi belanja daerah yang belum dipertanggungjawabkan (BPK RI 03/07/2012). Padahal tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar (Ebit et.al, 2012).

Tingginya proporsi Dana Perimbangan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan (transfer) pemerintah pusat (Fahri & Winston, 2013). Fakta ini tidak mencerminkan timbulnya kemandirian sebagaimana tujuan dilaksanakannya otonomi daerah, Namun demikian dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus semakin kecil (Harianto dan Priyo, 2010) dalam Fahri & Winston (2013). Hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi daerah kabupaten dan kota (Siahaan, 2013:50)

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, Sedangkan belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Gregorius & Sukartono, 2009). Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai kewajiban daerah, yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018).

Tabel 1.1
Tabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat 2010-2012

	2010	2011	2012
Pajak Daerah	3.813.657.917.311	1.722.331.145.317	4.247.570.831.622
Retribusi Daerah	829.219.691.360	730.821.644.856	934.830.599.432
Belanja Daerah	35.989.074.529.597	42.439.431.190.484	44.823.520.611.616

Sumber : BPS Provinsi Jabar yang diolah kembali oleh peneliti.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan (Siahaan, 2013:1). Siahaan pun mengungkapkan dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Upaya peningkataan retribusi dan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Faktor-faktor ekonomi yang diantaranya; jumlah penduduk, tingkat inflasi, PDRB, jumlah wisatawan, ketersediaan infrastruktur yang memadai (Gomies & Pattiasina, 2011).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Pengendalian dan pengelolaan penerimaan daerah di Provinsi Jawa Barat yang belum memadai dikarenakan penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah tidak tertib, penggunaan langsung atas pendapatan daerah, serta tunggakan pajak yang berpotensi tidak tertagih.
2. Penerimaan pajak daerah belum optimal dikarenakan 65% industri infrastruktur nasional ada di Jawa Barat, tetapi potensi perolehan pajak industri manufaktur masih belum optimal selama ini mayoritas kantor pusat industri manufaktur ada di jakarta, akibatnya pajak pun masuk ke pusat.
3. Pengelolaan belanja daerah yang belum sesuai perundang-undangan dikarenakan masih terdapat masalah belanja daerah yang belum dipertanggungjawabkan di Provinsi Jawa Barat.
4. Pelaksanaan otonomi daerah masih lemah terlihat pada besarnya belanja pegawai dan belanja rutin mengakibatkan belanja pembangunan dan pelayanan publik menjadi kecil banyak daerah yang menghabiskan anggaran belanja hingga 80% untuk belanja pegawai, hal ini dapat mengurangi kemampuan APBD untuk melaksanakan program kesejahteraan rakyat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah di pemerintahan kab/kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah di pemerintahan kab/kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah di pemerintahan kab/kota di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data, dan solusi permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah studi kasus Pemerintahan Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat”.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini untuk mempelajari dan mengkaji :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah Pemerintahan Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah Pemerintahan Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah Pemerintahan Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101), pengetian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

Sumber pendapatan daerah terdiri atas: Pertama,pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah; Kedua,dana perimbangan; dan Ketiga,lain-lain pendapatan daerah yang sah.(Bagijo, 2011:14)

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013:9) menjelaskan pajak daerah sebagai berikut :

"Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2.1.1.2 Sumber-sumber Pajak Daerah

Dalam Siahaan (2013:64) pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undag Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana di bawah ini.

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas :
   1. Pajak Kendaraan Bermotor
   2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
   3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
   4. Pajak Air Permukaan
   5. Pajak Rokok

b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :
   1. Pajak Hotel
   2. Pajak Restoran
   3. Pajak Hiburan
   4. Pajak Reklame
   5. Pajak Penerangan Jalan
   6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
   7. Pajak Parkir
   8. Pajak Air Tanah
   9. Pajak Sarang Burung Walet
   10. Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
   11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.1.3 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013 : 6) menjelaskan retribusi daerah sebagai berikut :

" Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

2.1.2.2 Objek dan Golongan Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:619) mengemukakan berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah., hal ini juga diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.

Menurut Siahaan (2013:620) sesuai UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawa ini.

a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.4 Belanja Daerah

2.1.4.1 Pengertian Belanja Daerah

Mahsun (2011 : 95), menjelaskan belanja daerah adalah sebagai berikut :

"Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah".

2.1.4.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah yang dikemukakan oleh Halim (2004:18) sesuai dengan klasifikasi belanja daerah menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.

a. Belanja Administrasi Umum
    1. Belanja Pegawai/Personalia
    2. Belanja Barang dan Jasa
    3. Belanja Perjalanan Dinas
    4. Belanja Pemeliharaan
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
c. Belanja Modal
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
e. Belanja Tidak Tesangka

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Siahaan (2013 : 4) pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Menurut Riduansyah (2003) kontribusi pajak terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh pajak hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 3,06% pertahun dan tumbuh rata-rata 32,64% pertahun, serta pajak hiburan rata-rata kontribusi sebesar 1,96% dan tumbuh rata-rata 8,58% pertahun.

2.2.1 Keterkaitan Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurusi keuangan daerah dan menggali potensi keuangan tersebut dengan memberikan kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi yang kemudian penerimaan daerah tersebut dipergunakan untuk membiayai pemerintahan daerah tersebut.

2.2.2 Keterkaitan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang nantinya akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kemakmuran masyarakat.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

"Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pemrintah Kota/Kabupaten di Jawa Barat)".

H_1 =Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H_2 =Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

H_3 =Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daera.

III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Definisi objek penelitian menurut Menurut Sugiyono (2012:38) "Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu yang objektif, valid dan realible. Dan juga digunakan untuk sasaran ilmiah yaitu siapa, apa dan dimana dan mempunyai variasi yang ditetapkan oleh peneliti. Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat).

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:2) mendefinisikan metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis".

Dalam penelitian ini, metode deskriptif dan verifikatif tersebut digunakan untuk menguji lebih dalam pengaruh integritas dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain menurut Moh. Nazir (2003:84) dalam Umi Narimawati (2010:30) mendefinisikan desain penelitian adalah sebagai berikut:

"Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Langkah-langkah desain penelitian menurut Umi Narimawati (2010:30) yang peneliti terapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena penelitian, selanjutnya menetapkan judul penelitian yang yaitu Pengaruh integritas dan kompetensi Auditor terhadap kualitas audit.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi;
3. Menetapkan rumusan masalah;
4. Menetapkan tujuan penelitian;
5. Menetapkan hipotesis penelitian, berdasarkan fenomena dan dukungan teori;
6. Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran variabel penelitian yang digunakan;
7. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data;
8. Melakukan analisis data;
9. Melakukan pelaporan hasil penelitian

3.3 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2010:38)**,** Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasional Variabel diperlukan untuk menetukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Independen (X)
   Sugiyono (2010:39) mendefinisikan variabel bebas adalah sebagai berikut:
   Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".
   Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka yang menjadi variabel bebas Integritas dan kompetensi auditor.
2. Variabel Dependen (Y).
   Menurut Sugiyono (2010:39) mendefinisikan variabel devenden adalah sebagai berikut:
   Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas."
   Variabel dependen alam penelitian ini yaitu kualitas audit.

3.4 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2009:137) menjelaskan data sekunder sebagai berikut:

"Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data".

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah berupa laporan realisasi pendapatan asli daerah dan laporan realisasi belanja daerah. Data ini merupakan data realisasi tahun anggaran 2010-2012 yang telah di olah dari pihak lain.

3.5 Alat Ukur Penelitian

3.5.1 Uji Validitas

"Uji Validitas Menunjukkan derajad ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti." (Sugiyono 2010:2)

Berdasarkan definisi diatas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Suatu alat ukur disebut valid bila dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2010:3) reliabiltas adalah derajad konsistensi/keajegan data dalam interval waktu tertentu.

Berdasarkan definisi diatas, maka relibilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan kekonsistenan. Suatu alat disebut reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek sama sekali diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Dalam hal ini relatif sama berarti tetap adanya toleransi perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran.

3.6 Populasi dan Penarikan Sampel

3.6.1 Populasi

Adapun pengertian populasi menurut Sugiyono (2009:115) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.”

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan asli daerah dan laporan realiasi belanja daerah Pemerintahan Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2012 dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 17 kabupaten dan 9 kota, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 130.

3.6.2 Sampel

Menurut Uma Sekaran (2006:123) menjelaskan sampel sebagai berikut:

“Sampel adalah sebagian dari populasi dan terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.”

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2006:61) menjelaskan *purposive sampling* sebagai berikut:

“Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu ”.

Peneliti mempunyai kriteria terhadap sampel yang akan diteliti yaitu berdasarkan :

1. Data yang diambil merupakan laporan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah.
2. Data tersebut diambil dari tahun 2010-2012 yaitu selama 3 tahun dikarenakan selama tahun tersebut terdapat fenomena.
3. Sampel yang diambil sebanyak enam periode karena sudah dianggap representatif (mewakili) untuk dilakukan penelitian.

Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Taro Yamane atau *Slovin* dalam Riduwan dan Kuncoro (2012:210) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Keterangan :
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
d^2 = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N.d^2+1} = \frac{81}{(81).0,1^2+1} = \frac{81}{1,81} = 45$$

3.7 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

   Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai dasar teori dan acuan untuk mengolah data dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan mengkaji literatur-literatur berupa buku, jurnal, makalah maupun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Riset Internet (*Online Research*)

   Pengumpulan data berasal dari situs-situs terkait untuk memperoleh tambahan literatur, jurnal dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.8 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.8.1 Rancangan Analisis

Berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Dalam pelaksanaan, penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan.

a. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh integritas dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
b. Penelitian verifikatif adalah penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel *independent* (X) terhadap variable *dependent* (Y) yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

1. Analisis Kualitatif

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dari variabel X1 (pajak daerah) dan X2 (retribusi daerah), peneliti menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai narasumber dari divisi yang terkait.

2. Analisis Kuantitatif

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dimana data variabel *independent* (X_1) pajak daerah dan (X_2) retribusi daerah yang dikumpulkan melalui kuesioner masih memiliki skala ordinal, maka sebelum di olah dan dipasangkan dengan data variabel *depandent* (Y) belanja daerah.

Sebelum kuesioner digunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi penelitian. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan (validitas) dan kekonsistenan (reliabilitas) alat ukur penelitian, sehingga diperoleh item-item pertanyaan/pernyataan yang layak untuk digunakan sebagai alat ukur untuk pengumpulan data penelitian.

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran asumsi-asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak

b) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat.

c) Uji Heterokedastisitas

Asumsi heterokedastisitas adalah asumsi regresi dimana varians dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan lain

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2010:149) analisis linier regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variable independen dinaikan/diturunkan.

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh feeaudit dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung.

3. Analisis Korelasi *Pearson*

Analisis Koefisiensi Determinasi (Kd) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

4. Koefisien Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (Kd) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

1.2.5.2 Uji Hipotesis

a. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1) Hipotesis parsial antara variabel bebaspajakdaerah terhadap variable terikat belanja daerah.

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pajak daerah terhadap belanja daerah.

Ha : Terdapat pengaruh positif yang signifikan pajak daerah terhadap belanja daerah.

2) Hipotesis parsial antara variabel bebas retribusi daerah terhadap variabel terikat belanja daerah.

Ho:Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah.

Ha : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah.

3) Hipotesis secara keseluruhan antara variabel bebas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap variabel terikat belanja daerah .

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah .

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah .

Hipotesis Statistik

1) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t).

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji dua pihak (*two tail test*) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol : $\beta = 0$ dan hipotesis alternatifnya (Ha) : $\beta \neq 0$

Ho:β=0:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak daerah terhadap belanja daerah.

Ha:β≠0:Terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak daerah terhadap belanja daerah.

Ho : β = 0:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah.

Ha : β ≠ 0:Terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah.

.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F).

Ho : β = 0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Integritas dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah .

Ha : β ≠ 0 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah .

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.3.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat

Dari hasil pengujian statistik ditunjukkan bahwa pengaruh langsung variabel pajak daerah (X_1) terhadap variabel belanja daerah (Y) memiliki koefisien korelasi sebesar 0,590 ini berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara Belanja Daerah terhadap Belanja Daerah. Jika diinterpretasikan menurut kriteria dalam Sugiono (2010) maka eratnya korelasi Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah adalah cukup kuat karena berkisar antara 0,400 sampai dengan 0,599. Dari temuan statistik tersebut dapat dinyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh secara parsial dan signifikan positif terhadap belanja daerah. Pajak daerah dapat menjelaskan belanja daerah sebesar $Kd = r_{x1y}X100\% = 0{,}377^2X100\% = 14{,}213\%$ sementara sisanya sebesar 85,787% dijelaskan oleh variabel lain namun diyakini turut mempengaruhi belanja daerah, seperti dana alokasi umu, dana alokasi khusu, lain-lain PAD yang sah, dan lain-lain. Koefisien regresi variabel pajak daerah (X_1) sebesar 1,544 artinya jika variabel elanja Daerah mengalami perubahan nilainya 1 dan Pajak Daerah mengalami perubahan nilainya 0 maka belanja daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar $Y = 1.005.10^{12} + 10.711(1) + 1.544(0) = 1.005.10^{14}$

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini didukung oleh Dwi & Elva (2012) yang menyatakan bahawa pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Madiun. Rudiansyah (2003) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah maih fluktuatif. Bakharudin yang menyatakan pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah terpisah dan lain-lain PAD yang sah berperan terhadap belanja daerah untuk mendukung kemandirian daerah. Gregorius dan Sukartono (2009) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hasil pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.

Fenomena yang ada menyebutkan bahwa Fenomena yang ada menyebutkan dalam pelaksanaan otonomi masih ada masalah yang sama, utamanya terkait dengan belanja pegawai dan belanja rutin yang sangat besar, akibatnya ruang untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik menjadi kecil sedangkan klasifikasi belanja daerah menurut Darise (2008) fungsi-fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyaraka. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan, kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001.

Maka dari itu, pajak daerah sebagai sumber penerimaan yang dapat diandalkan dan digali potensinya oleh daerah untuk belanja daerah atau dengan kata lain membantu dalam pembiayaan dan pembangunan pada setiap kab/kota. Ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menjawab fenomena yang terjadi bahwa pajak daerah dapat ditingkatkan dalam pengelolaan dan pengendalian nya untuk menunjang belanja daerah dalam pembiayaan dan pembangunan daerah.

4.3.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah Kab/kota di Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Dari hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0,575 dapat dilihat bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja pemeliharaan. Pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan memiliki korelasi sedang yaitu sebesar 11,834%, sedangkan sisanya sebesar 88,166% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam model penelitian seperti dana alokasi khusu dan lain-lain PAD yang sah. Selain itu, perhitungan dari koefisen korelasi menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki hubungan positif terhadap belanja daerah, artinya semakin besar retribusi daerah maka belanja daerah kab/ kota di Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan semakin besar pula.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi & Elva yang menyatakan pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Madiun. Rudiansyah yang menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah maih fluktuatif. Tingginya proporsi Dana Perimbangan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan (transfer) pemerintah pusat. Bakharudin yang menyatakan pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah terpisah dan lain-lain PAD yang sah berperan terhadap belanja daerah untuk mendukung kemandirian daerah. Gregorius dan Sukartono (2009) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hasil pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.

Fenomena yang ada menyebutkan pengendalian dan pengelolaan penerimaan daerah di Pronvinsi Jawa Barat yang belum memadai dikarenakan penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah tidak tertib, Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa atas pungutan dasar persetujuan pemerintah pusat. Tetapi potensi perolehan pajak industri manufaktur masih belum optimal selama ini mayoritas kantor pusat industri manufaktur ada di jakarta, akibatnya pajak dan retribusi pun menjadi masuk ke pusat. Retribusi adalah pembayaran wajib atas jasa tertentu yang diberikan oleh daerah, jasa tersebut dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari daerah (Siahaan, 2013:5).

Maka dari itu, retribusi daerah sebagai sumber penerimaan yang dapat diandalkan dan digali potensinya oleh daerah untuk belanja daerah atau dengan kata lain membantu dalam pembiayaan dan pembangunan pada setiap kab/kota. Ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menjawab fenomena yang terjadi bahwa retribusi daerah dapat ditingkatkan dalam pengelolaan dan pengendalian nya untuk menunjang belanja daerah dalam pembiayaan dan pembangunan daerah.

4.3.3 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui secara simultan terdapat pengaruh variabel pajak derah dan retribusi daerah terahadap belanja daerah, ini dibuktikan dengan hasil F_{hitung} = 28,919 > F_{tabel} =3,11 . hal ini didukung dari nilai koefisien determinansi sebesar 42,6% yang menunjukkan bahwa variabel belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan sisanya 57,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi & Elva (2012) yang menyimpulkan bahwa hasil

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak daerah terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten Madiun.

Hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah terhadap belanja derah ($t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,596 > 1,99). Hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa terdapat pengaruh antara retribusi daerah terhadap belanja derah (nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,241 > 1,99).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rudiansya (2003) bahwa Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah masih fluktuatif. Dalam Harianto (2007) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik.

Fenomena yang ada menyebutkan pengendalian dan pengelolaan penerimaan daerah di Pronvinsi Jawa Barat yang belum memadai dikarenakan penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah tidak tertib, Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah. Sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan primadona untuk penerimaan daerah yang peneerimaan nya dapat diandalkan dan dioptimalkan sesuai dengan kemampuan di tiap-tiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat yang diketahui bahwa setiap kabupaten atau kota memiliki potensi yang berbeda-beda.

Maka dari itu, pajak daerah danretribusi daerah sebagai sumber penerimaan yang dapat diandalkan dan digali potensinya oleh daerah untuk belanja daerah atau dengan kata lain membantu dalam pembiayaan dan pembangunan pada setiap kab/kota. Ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menjawab fenomena yang terjadi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditingkatkan dalam pengelolaan dan pengendalian nya untuk menunjang belanja daerah dalam pembiayaan dan pembangunan daerah.

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari dan permasalahan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah, maka pada bagian akhir dari penelitian ini peneliti menarik simpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pajak daerah memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap belanja daerah kab/kota di Provinsi Jawa Barat, artinya apabila pajak daerah mengalami kenaikan dan retribusi daerah tidak mengalami kenaikan belanja daerag akan mengalami kenaikan.
2. Retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap belanja daerah kab/kota di Provinsi Jawa Barat, artinya apabila retribusi daerah mengalami kenaikan dan pajak daerah tidak mengalami kenaikan belanja daerag akan mengalami kenaikan.
3. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kab/kota di Provinsi Jawa Barat. Dengan pengaruh yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis variabel pajak daerah dan retribusi daerah dengan belanja daerah dalam penelitian ini dapat digeneralisasikan/diberlakukan umum pada anggota populasi secara keseluruhan. Hasil Analisis 1
   Pegaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah
4. Terdapat pengaruh signifikan baik secara simultan ataupun secara parsial antara pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengedalian dan pengelolaan penerimaan daerah kab/kota di Provinsi Jawa Barat dengan cara perbaikan perbaikan kualitas pelayanan yang terus menerus dan berkesinambungan, sosialisasi kepada wajib pajak, ekstensifikasi dengan menggali sumber pendapatan daerah khususnya pajak daerah, hal ini dapat ditunjang dengan penambahan subjek dan objek pajak baru. Penatausahaan piutang pajak dan penggunaan langsung atas pendapatan daerah agar dapat meminimalisir tunggakan pajak yang berpotensi tidak tertagih.
2. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah khusus retribusi daerah memungkinkan pemerintah daera untuk mengoptimalkan pelayanan kepada publik lebih utamanya kepada penerima jasa atas pembayaran yang diterima oleh pemerintah daerah dari penerima jasa dengan cara peningkatan kualitas pelayanan public serta penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang perbaikan kualitas pelayanan publik, agar pembayaran retribusi daerah menjadi tertib. Khusus terkait otonomi daerah yang dapat memungkinkan

terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan, sehingga belanja daerah dapat di alokasikan untuk kepentingan masyarakat.

3. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi cukup besar untuk pendapatan daerah di tiap kabupaten atau kota meskipun masih fluktuatif. Maka dari itu memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara pengelola pajak daerah yang perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah serta mengadakan penelitian dan pendataan secara rutin terhadap obyek dan subyek pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

5.2.2 Saran Akademis

1. Dalam penelitian ini hanya mengambil dua variabel independen sehingga hasil penelitan ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi belanja daerah. Oleh karena itu perlu ditambahkan lagi variabel yang mempengaruhi belanja daerah, guna menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memungkinkan untuk memakai variabel tambahan selain dari pajak daerah dan retribusi darah yang dapat mempengaruhi belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Syukriy Abdullah. 2006. Studi atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah daHubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. ISSN: 0216-8642, Vol. 2, No. 2, p. 17 -32.

Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah.* Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.

Afiah & Nur, Nunuy. 2009. Akuntansi Pemerintahan Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Kencana: Jakarta.

Alnisa Septya Ratu. 2013. *Porsi APBD Untuk Belanja Pegawai Terbesar 2013 Dominan Terjadi di Jawa dan Sumatera*. Senin, 22 Juli 2013. (http://wartaekonomi.co.id).

Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat,.

Bakharudin. *Peranan PAD terhadap Belanja Daerah untuk Mendukung Kemandirian Daerah.*

Boediono. *Otonomi daerah masih memiliki masalah yang sama*. (Republika.co.id 12-02-2013)

Budi, Purnomo S. 2009. *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Bagijo, Himawan. *Pajak dan Rteribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Propinsi di Jawa Timur). Jurnal perspektif.* Vol. XVI No.1 Thn 2011 Edisi Januari.

Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (ASP)*. Jakarta: Indeks

Dirjen Perimbangan Keuangan RI. 2013. *Laporan Evaluasi Belanja Daerah.*

Ebit Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadapa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. ISSN: 2302-0164, Vol. 1 No. 1, p. 1-15. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Gomies dan Pattiasina. 2011. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Maluku Tenggara.* Jurnal Aset September 2011 hal. 175-183 ISSN:1693-928x

Gregorius N. dan Sukartono. 2009*. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta analisi Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008.* Jurnal TEMA Vol. 6 Edisi I Maret 2009 hal. 32-50 ISSN : 1693-9727.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi *Analisi Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro*. Semarang.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi.* Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi.* Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. dan M. Kusufi, Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik:* Akuntansi Keuangan Daerah*.* Jakarta: Salemba Empat, Edisi 4.

Husein, Umar. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.

Indriantoro, Nur. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Cetakan 2.* Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Julitawati, Darwanis dan Jalaludin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 1 Agustus 2012.

Kresnandra dan Erawati. 2013. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi .* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayan Vol.5 No. 3 ISSN:2302-8506.

Kadarukmi Retno M.E. 2010. *Tinjauan Yuridis atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikaitkan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah.* Jurnal Adm. Bisnis Vol. 6 No. 2 Hal. 169-178 2010. ISSS:0216-1249.

Lex Laksamana. 2012. *Pajak Masih besar masuk ke pusat*. (Bdg Mi.com 12-06-2012)

Mahsun, Mohamad. 2011. *Akuntansi Sektor Publik edisi 3*

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Marwanto Harjowiryono. 2013. Banyak daerah yang menghabiskan anggaran belanja pegawai hingga 80%. (wartaekonomi.co.id 22 Juli 2013)

Masyhuri dan Zainuddin. 2009. *Metodologi Penelitian*: Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung: PT Refika Aditama.

Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. ISSN: 2302-0164, Vol. 2, No. 2, p. 80-90. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Mohammad Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhamad Syahri Romadhon. 2013. *Bea Pegawai Tinggi, Kota Cirebon Minim Tenaga Ahli.* Selasa, 30 April 2013. (http://m.inilah.com).

Noor, Juliansyah. 2012. *Metode Penelitian*: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.

Oktora, Eka Fahri dan Pontoh, Winston. 2013*. Analisis Hubungan PAD, DAU dan DAK atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah*. Jurnal Accountability Vol. 2 No. 1, Juni 2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Prakoso, Bambang Kesi. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*, UUI Press, Yogyakarta.

Rudiansyah, Mohammad. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dan APBD guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor.* Jurnal Makara Sosial Humainora Vol. 7 No. 2 Desember 2003.

Riduan dan Kuncoro, Engkos Achmad. 2012. *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung: Alfabeta.

Rustiyaningsih, Sri. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan (Studi Empiris Pada Pemerintaha Daerah Jawa Timur). *Widya Warta*. ISSN: 0854-1981, No. 2, p. 195-209.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sasana, Hadi. 2011. *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era otonomi dan desentralisasi*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 18 No. 1 hal 46-58 ISSN:1412-3126

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan REtribusi Daerah edisi revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sinaga, Timbul dan Rimbun C.D Sidabutar. 2012. Pengaruh Belanja Kendaraan Dinas dan Nilai Kendaraan Dinas Terhadap Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Dinas Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. ISSN: 2086-6879, Vol. 3, No. 1, p. 11-22. Universitas HKBP Nommensen.

Solikin, Ikin. 2007. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.*Jurnal Eksklusif Vol.4 No.4*. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Slipi. Jakarta.

Subowo dan Endar Rosita Wati. 2010. Hubungan Antara PAD dan Dana Perimbangan Dengan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kudus. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. ISSN: 2085-3277, Vol. 2, No. 2, p. 73-82. Universitas Negeri Semarang.

Subowo dan Endar Rosita Wati. 2010. Hubungan Antara PAD dan Dana Perimbangan Dengan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kudus. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. ISSN: 2085-4277, Vol. 2, No. 2, p. 73-82. Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan* : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-14.

Syahri, Alhusin. 2003. *Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS.10 For Windows*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Akuntansi Terapan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM, Jakarta: Genesis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LAMPIRAN

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	Instrumen
Pajak Daerah Variabel *Independen* {Variabel X_1)	"Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Marihot Pahala Siahaan, 2013:9)	- Pajak hotel - Pajak restoran - Pajak hiburan - Dll	*Nomonal*	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Retribusi Daerah Variabel *Independen* {Variabel X_2)	"Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan." (Marihot Pahala Siahaan, 2013:6)	- Retribusi jasa umum - Retribusi jasa khusus - Retribusi perizinzn tertentu	*Nominal*	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Belanja Daerah Variabel *Dependen* {Variabel Y)	"Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah". (Mahsun, 2011:95)	- Belanja Langsung - Belanja Tidak Langsung	*Nominal*	Realisasi Belanja Daerah

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.575	.590
	X1	.575	1.000	.596
	X2	.590	.596	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000
	X1	.000	.	.000
	X2	.000	.000	.
N	Y	81	81	81
	X1	81	81	81
	X2	81	81	81

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.653[a]	.426	.411	5,68969E11	.426	28.919	2	78	.000	2.002

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.872E25	2	9.362E24	28.919	.000[a]
	Residual	2.525E25	78	3.237E23		
	Total	4.397E25	80			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.005E12	9.714E10		10.348	.000	8.118E11	1.199E12					
	X1	1.544	.476	.346	3.241	.002	.596	2.493	.575	.344	.278	.645	1.550
	X2	10.711	2.979	.384	3.596	.001	4.781	16.642	.590	.377	.308	.645	1.550

a. Dependent Variable: Y